

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dilihat dari letak geografisnya, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sumberdaya alam yang melimpah. Kekayaan alam/potensi alam ini dapat dijadikan modal untuk mengembangkan industri pariwisata. Selain kekayaan alam, Indonesia juga kaya akan budayanya. Hal ini menambah daya tarik untuk sektor pariwisata di Indonesia. Menurut Fandeli (2002: 7), pariwisata merupakan suatu industri yang banyak menghasilkan devisa bagi negara sehingga pemerintah berusaha untuk meningkatkan sektor ini dengan mengambil langkah-langkah kebijaksanaan pembangunan pariwisata. Destinasi pariwisata Indonesia biasanya ditujukan di suatu daerah wisata atau yang disebut dengan desa wisata.

Desa wisata adalah pengembangan dari suatu wilayah desa dengan cara menggali potensi dari desa tersebut tanpa merubah yang sudah ada. Potensi tersebut digali dengan memanfaatkan semua unsur-unsur yang ada di dalam desa yang fungsinya sebagai atribut produk wisata berskala kecil sehingga mampu menyediakan dan memenuhi kebutuhan selama perjalanan wisata mulai dari aspek daya tarik hingga berbagai fasilitas pendukungnya sebagai rangkaian dari aktivitas pariwisata (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sleman, 2007: 7).

Di Indonesia, keberadaan desa wisata semakin berkembang pesat. Data Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat 987 desa wisata yang tersebar di berbagai wilayah dan jumlahnya terus

meningkat sejak diselenggarakannya desa wisata pada tahun 2009. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata DIY tahun 2016, desa wisata di DIY mencapai 122 yang tersebar diantaranya 38 desa wisata di Kabupaten Sleman, 14 desa wisata di Kabupaten Gunung Kidul, 27 desa wisata di kota Yogyakarta, 33 desa wisata di Kabupaten Bantul, dan 10 desa di Kabupaten Kulon Progo. Tema sejumlah desa wisata yang telah berdiri di DIY adalah desa wisata alam, budaya lokal dan kerajinan.

Dalam ajang festival desa wisata 2018 yang diadakan oleh Pemerintah di salah satu kabupaten di DIY yakni Kabupaten Sleman, Desa Wisata Pulesari terpilih menjadi desa wisata terbaik. Desa Wisata Pulesari berlokasi di Desa Wonokerto Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Wisata Pulesari adalah sebuah desa wisata didirikan sendiri oleh masyarakat sehingga disebut juga sebagai desa wisata mandiri. Desa ini menyajikan keindahan alam dan budaya tradisi. Desa wisata ini didirikan dengan tujuan untuk memperdayakan SDM dan SDA yang ada sehingga menarik wisatawan serta diakui dan dikenal oleh masyarakat.

Desa Wisata Pulesari memiliki keunggulan dalam potensi wisata. Keunggulan dari desa ini antara lain memiliki objek wisata goa sejarah, *traking* sungai, wisata kebun salak, wisata perikanan, wisata kuliner, kerajinan, seni budaya dan *homestay*. Di Desa Wisata Pulesari terdapat 8 goa sejarah yaitu Goa Dampar, Goa Canguk, Goa Grenjeng, Goa Wayang, Goa Gedhe, Goa Ular, Goa Bedhog, dan Goa Leri. Selain goa sejarah, objek wisata yang cukup diminati

wisatawan Desa Wisata Pulesari adalah *traking* sungai. *Traking* sungai dilakukan di sungai Bedok 1 dan sungai Bedok 2.

Di desa wisata ini objek wisata kebun salak merupakan agribisnis wisatawan di mana wisatawan dapat memetik salak dan memakan salak dengan bebas di dalam kebun salak. Wisata perikanan di desa ini meliputi kegiatan memancing dan menangkap ikan. Desa Wisata Pulesari menawarkan berbagai makanan dan minuman khas pada objek wisata kuliner. Makanan khas desa wisata ini adalah sego megono, pepes nila, dan sego pecel. Minuman khas desa wisata ini adalah jaeser, kolak salak, dan wedang jaburan. Kerajinan yang ada di desa wisata ini berupa kerajinan tangan pembuatan tenggok, kerajinan tangan pembuatan keping, kerajinan tangan pembuatan pandai besi, dan kerajinan tangan pertukangan kayu. Seni dan budaya yang ditampilkan di Desa Wisata Pulesari berupa kesenian tari salak, kesenian kubro siswo, prajurit bergodo, kesenian religi hadroh, upacara adat pager bumi, dan upacara adat sadranan.

**Tabel 1.1** *Data Kunjungan Desa Wisata Pulesari*

Wisatawan	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Dalam Negeri</b>	6.035	32.178	50.271	52.947	63.927	72738
<b>Mancanegara</b>	-	14	28	32	47	185

Sumber: Data Kunjungan Desa Wisata Pulesari Tahun 2013-2018 (Pemerintah Desa Wonokerto, 2018)

Berdasarkan data pemerintah Desa Wonokerto di atas, jumlah kunjungan wisatawan ke Desa Wisata Pulesari terus meningkat sejak tahun 2013 sampai tahun 2018. Wisatawan yang mengunjungi Desa Wisata Pulesari tidak hanya dari wilayah nusantara tetapi juga dari mancanegara. Wisatawan mancanegara terus meningkat dari tahun 2013 sampai 2018.

Desa wisata ini dibentuk pada tanggal 26 Mei 2012. Desa ini terbentuk berkat komitmen masyarakat yang ingin menciptakan sebuah desa yang aman, tenteram, nyaman, dinamis dan indah dengan berbagai potensi yang ada. Meskipun desa wisata ini baru dibentuk, namun sudah ada beberapa penghargaan yang diraih. Setelah 2 tahun berdiri, Desa Wisata Pulesari mendapatkan juara I tingkat Kabupaten Sleman Tahun 2014 dalam rangka kegiatan (Festival Desa Wisata Se-Kabupaten Sleman) yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman. Pada tahun 2016 Desa Wisata Pulesari ditunjuk oleh Dinas Pariwisata DIY menjadi salah satu perwakilan dari Yogyakarta yang berpartisipasi dalam CBT (*Community Based Tourism*) Award ASEAN. Selanjutnya pada tahun 2018 Desa Wisata Pulesari kembali mendapatkan juara I tingkat Kabupaten Sleman Tahun 2018 dalam rangka kegiatan (Festival Desa Wisata Se-Kabupaten Sleman) yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman.

Desa Wisata Pulesari bersama empat destinasi wisata di Indonesia yakni Pantai Pangandaran, Gunung Rinjani di Lombok dan Wakatobi ditunjuk sebagai pilot *project sustainable tourism development* di Indonesia. Keempat perwakilan destinasi wisata ini Bersama sama menyusun Peraturan Menteri dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan dengan pedoman dari UNWTO (*United Nation-World Tourism Organization*) atau Organisasi Pariwisata Dunia di mana ada empat indikator yang menjadi barometer yakni kelembagaan, sosial budaya, ekonomi dan lingkungan. Karena Pariwisata di Indonesia menyumbang devisa

yang cukup banyak maka perlu adanya sebuah peraturan yang mengatur agar dampak dari pariwisata ini tidak merugikan lingkungan dan pariwisata itu sendiri.

Pencapaian Desa Wisata Pulesari di atas tentu didapatkan melalui peran dan kerjasama dari beberapa pihak dalam hal ini masyarakat Desa Wisata Pulesari dan pemerintah Desa Wonokerto. Bentuk kerjasama antara pemerintah Desa Wonokerto dan masyarakat Desa Wisata Pulesari berupa kolaborasi. *Collaborative governance* (Zaenuri, 2018: 39) merupakan sebuah tata kelola yang didalamnya mengatur lembaga-lembaga baik lembaga negara maupun non negara yang terlibat secara langsung dalam proses pengambilan suatu keputusan bersama yang berorientasi pada konsensus dan musyawarah.

Manajemen kolaboratif sangat penting karena mampu membuat kinerja birokrasi menjadi lebih baik serta institusi yang menerapkan manajemen kolaboratif akan mendapat keuntungan. Keuntungan tersebut antara lain adanya kekuatan yang lebih besar sehingga mampu mengatasi berbagai permasalahan yang kompleks, dapat mencapai kemajuan yang lebih tinggi, kolaborasi menjadi lebih berdaya, mendorong upaya pemecahan masalah secara bersama, dapat mengurangi dan mencegah konflik, menumbuhkan rasa keadilan dan saling percaya, serta mampu mengikis ego baik ego daerah maupun sektoral (Keban dalam Zaenuri, 2014: 161-162). Dalam kolaborasi Pemerintah Desa Wonokerto dengan masyarakat Desa Wisata Pulesari, Pemerintah Desa Wonokerto memberikan dukungan kepada masyarakat Desa Wisata Pulesari dalam bentuk pembuatan *event-event* kegiatan, mendukung infrastruktur serta meningkatkan daya kapasitas (pelatihan pemandu, pelatihan pengembangan *homestay*).

Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengangkat judul “**Kolaborasi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Desa Wisata Pulesari di Desa Wonokerto**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah yang diambil oleh peneliti adalah:

1. Sejauh mana kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Wonokerto dan masyarakat Desa Wisata Pulesari?
2. Bagaimana kolaborasi masyarakat desa dan pemerintah desa dalam pengelolaan Desa Wisata Pulesari di Desa Wonokerto?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kolaborasi antara Pemerintah Desa Wonokerto dan masyarakat desa Pulesari dalam pengelolaan Desa Wisata Pulesari.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan tentang kolaborasi dalam pengelolaan desa wisata dan mengetahui serta memahami teori-teori yang diterapkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti dengan tema atau topik ini.
- b. Sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah desa pulesari dan masyarakat terkait dengan kolaborasi dalam pengelolaan desa wisata.
- c. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pembaca dalam segi pendidikan terkait tata kelola pariwisata bagi masyarakat luas maupun mahasiswa.

### 1.5 Studi Terdahulu

No	Judul	Penulis	Analisis
1	Kolaborasi Antar <i>Stakeholder</i> dalam Pembangunan Inklusif pada Sektor Pariwisata (Studi Kasus Wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi)	Mia Fairuza (2017)	Penelitian yang dilakukan menyebutkan bahwa kolaborasi yang dilakukan oleh beberapa pihak di Pulau Merah belum berjalan dengan baik. Walaupun demikian pencapaian kolaborasi dalam pembangunan inklusif tetaplah dapat dicapai. Pariwisata yang disediakan oleh Pulau Merah sudah dapat dirasakan manfaatnya oleh semua pihak (pemerintah dan masyarakat). Tujuan dari pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan tercapai karena semua masyarakat ikut berpartisipasi. Semua pihak yang berperan dalam pembangunan sektor wisata di pulau merah telah berupaya dalam menjaga ekologi di daerah tersebut.
2	Kolaborasi dan Sinergitas dalam Pembangunan Pariwisata Lampung Menuju Destinasi Unggulan	Citra Persada (2017)	Dalam rangka menuju pengembangan destinasi wisata berkualitas diperlukan pendekatan kreatif sesuai dengan karakter pariwisata yang multidimensional. Perumusan kebijakan dan

			<p>perencanaan pembangunan dengan pendekatan TEMATIKHOLISTIK kiranya sangat tepat untuk sektor pariwisata. Melalui pendekatan ini, maka pariwisata dapat menjadi bagian yang integral (terpadu) dari pembangunan wilayah dan kota di Provinsi Lampung. Selain itu kolaborasi dan sinergitas antara stakeholders (pengusaha, pemerintah, masyarakat, media) sangat dibutuhkan dalam pengembangan kelembagaan pariwisata daerah.</p>
3	<p>Mengelola Pariwisata-Bencana: Perlunya Perubahan Paradigma Pengelolaan Pariwisata dari <i>Adaptive Governance</i> Menuju <i>Collaborative Governance</i></p>	<p>Muchamad Zaenuri (2014)</p>	<p>Penerapan <i>collaborative governance</i> yang berlangsung telah melibatkan peran serta masyarakat sekitar kawasan Merapi yang terkena dampak langsung erupsi Merapi dalam hal operator trail, operator jeep, penyedia jasa wisata, penjaja makanan, penjaja souvenir dan lain sebagainya. Tim pengelola ini menjadi motor penggerak bagi pelayanan pariwisata di kawasan tersebut. Hingga kini adanya pengelola ini cukup mampu menggerakkan <i>collaborative governance</i> dalam pengelolaan kawasan wisata <i>volcano tour</i> Merapi.</p>
4	<p><i>Collaborative Governance</i> Dalam Pengembangan Desa Wisata Wukirsari di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul</p>	<p>Fajrina Risanti (2018)</p>	<p><i>Collaborative governance</i> yang dilakukan dalam pengembangan desa wisata di Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari delapan faktor pengukur keberhasilan kolaborasi menurut DeSeve (2007) yang mana ada beberapa hal yang belum tercapai diantaranya belum adanya aturan resmi yang mengikat kolaborasi yang dijalankan, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran</p>



			serta fasilitas sarana prasarana desa wisata dan kurangnya kepercayaan antar stakeholder dalam pengembangan desa wisata. Adapaun faktor yang menghambat keberhasilan yakni faktor budaya, faktor institusi, dan faktor politik
5	Analisis Penerapan <i>Collaborative Governance</i> dalam Pengelolaan Pariwisata Bencana <i>Lava Tour</i>	Rintan Mirza Diani dan Yoanes Kevin Gratianus Simbolon (2017)	Ada 3 (tiga) sektor yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata bencana <i>lava tour</i> di merapi, yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal. Wujud dari adanya kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata bencana <i>Lava Tour</i> tersebut dapat dilihat dari pembagian kerja masing-masing pihak.
6	Peranan Pemerintah Daerah Dalam Manajemen Kolaborasi Sumber Daya Pesisir (Kasus : Desa Waha, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara)	Resha Nuzul Safitri (2017)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tipe pengelolaan kolaboratif sumber daya pesisir di Desa Waha yaitu pada tipe Instrukturif yang menunjukkan adanya dominansi peran pemerintah dibanding peran masyarakat. Adapun peranan pemerintah daerah dalam pengelolaan kolaboratif sumber daya pesisir ada 5 yaitu pemerintah berperan sebagai fasilitator, pemerintah berperan dalam membangun kapasitas pada institusi lokal, pemerintah berperan dalam membangun rasa patuh masyarakat, pemerintah berperan dalam melaksanakan fungsi eksekutif, pemerintah sebagai <i>gatekeeper</i> . Peranan masyarakat dapat dibagi menjadi 3 yaitu masyarakat sebagai <i>social control</i> , masyarakat sebagai obyek pemanfaat dan kelompok pengguna sumber daya, dan masyarakat turut serta melindungi keberlanjutan sumber daya pesisir.
7	Analisis Stakeholders Dalam	Mira Janu Yustisi	Dalam pengelolaam objek wisata Gili Trawangan, kolaborasi yang

	Pengelolaan Objek Wisata Gili Trawangan di Kabupaten Lombok Utara	(2017)	dilakukan hanya berbentuk kegiatan/even-even pariwisata dan ajang promosi pariwisata. Kolaborasi ini hanya dilakukan oleh dua sektor yaitu pemerintah dan swasta.
8	Potensi Kolaborasi Dalam Pengelolaan Taman Nasional Teluk Cenderawasih di Papua	Aji Winara dan Abdullah Syarief Mukhtar (2011)	Pengelolaan Taman Nasional Teluk Cenderawasih sangat berpotensi sehingga memungkinkan untuk dilaksanakannya praktek kolaborasi sesuai Permenhut No. P.19/Menhut-II/2004. Pemangku kepentingan utama langsung dalam pengelolaan taman nasional di Papua antara lain Balai Taman Nasional, Pemerintah Daerah, Masyarakat Adat dan LSM. Sedangkan pemangku kepentingan utama tidak langsung antara lain TNI/POLRI, Lembaga Ilmiah, Pemetaan Diklat, serta Lembaga Keagamaan.
9	Model Kolaborasi Perencanaan Antara Balai Taman Nasional Wakatobi dan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Secara Lestari	Hery Sopari, Ngakan Putu Oka, dan Darmawan Salman (2014)	Model <i>collaborative governance</i> di terapkan dalam pengembangan kampung budaya Dusun Sejo dimana pihak pemerintah dan non pemerintah terdapat hubungan kerjasama antar stakeholders untuk memajukan kampung budaya Dusun Sejo, namun masih terdapat beberapa stakeholders yang belum menjalankan perannya secara maksimal dan pengembangan atau pembangunan kampung budaya tidak berkelanjutan sehingga kampung budaya Dusun Sejo belum bisa berkembang dengan baik.
10	Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat ( <i>Community Based Ecotourism</i> ) dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan di	Lia Afriza, Titing Kartika, dan Anti Riyanti (2017)	Model kolaborasi yang ada di Desa Karongsong melibatkan masyarakat, pemerintah dan industri pariwisata. Model kolaborasi ini dapat menjadi alternatif sektor ekonomi untuk mempercepat menanggulangi kemiskinan, sektor ekonomi dianggap cukup memiliki prospek

	Desa Karangsong Kabupaten Indramayu		adalah sektor pariwisata. Hal ini cukup beralasan karena pariwisata memiliki andil dan memberikan kontribusi cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil di pedesaan Karangsong.
--	---	--	--

Berdasarkan beberapa penelitian yang saya ambil sebagai sumber studi pustaka, terdapat perbedaan antara penelitian yang akan saya lakukan dengan penelitian tersebut. Dari sepuluh penelitian yang diambil, secara keseluruhan para peneliti membahas tentang kolaborasi dan menjelaskan bahwa rata-rata kolaborasi yang dilakukan belum berhasil. Hal ini dikarenakan beberapa kolaborasi tersebut hanya didominasi oleh pemerintah saja, komponen-komponen dalam kolaborasi tidak dijalankan dengan baik, serta penyelenggaraan kolaborasi hanya dilakukan saat ada kegiatan-kegiatan tertentu. Dari semua studi pustaka, hanya satu yang menyatakan keberhasilan penyelenggaraan kolaborasi yaitu kolaborasi dalam tiga sektor (masyarakat, pemerintah dan swasta) pada pariwisata bencana yang berlokasi di daerah Merapi. Penelitian yang akan saya lakukan ini berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang akan saya lakukan lebih memfokuskan pada kolaborasi yang dilakukan oleh dua sektor yaitu masyarakat dan pemerintah desa dalam pengelolaan Desa Wisata Pulesari di Desa Wonokerto.

## **1.6 Kerangka Teoritik**

### **1.6.1 Kolaborasi**

Kolaborasi berasal dari bahasa Inggris (*co-labour*) yang berarti bekerja bersama. Kolaborasi mulai digunakan pada abad ke-19. Pada masa itu, organisasi

yang berjalan menjadi semakin kompleks. Hal tersebut menjadi titik awal penggunaan sistem kolaborasi dalam berbagai macam organisasi (Wanna, 2008: 3). Selanjutnya, menurut Schrage dalam Harley (2010: 18), kolaborasi adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menyatukan berbagai pihak demi mencapai tujuan bersama.

Zaenuri (2018: 39) menyatakan bahwa *collaborative governance* ialah sebuah tata kelola yang didalamnya mengatur lembaga-lembaga baik lembaga negara maupun non negara yang terlibat secara langsung dalam proses pengambilan suatu keputusan bersama yang berorientasi pada konsensus dan musyawarah. Kemudian Schrage dalam Aggranoff (2003: 4) mengatakan bahwa kolaborasi merupakan suatu hubungan yang dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah. Hal ini sejalan dengan pendapat Grey dalam Fendt (2010: 19), yang menyatakan bahwa kolaborasi adalah proses dimana diperlukannya kesadaran dari stakeholders untuk melihat suatu permasalahan dan mencoba mencari solusi untuk masalah tersebut.

Raharja (2008: 8) mengungkapkan bahwa kolaborasi merupakan suatu kerjasama antar organisasi agar mencapai tujuan bersama. Selanjutnya Sullivan dan Skelcher dalam Zaenuri (2018: 42) mengatakan bahwa terdapat faktor kunci dalam membangun kapasitas kolaborasi. Faktor kunci tersebut adalah komunikator yang terampil dan memainkan peran penting dalam membangun suatu hubungan memfasilitasi serta mengoordinasikan bentuk kerjasama, dan membuat sebuah *link* yang kuat antar pemangku kepentingan berdasarkan

kapasitas individu dan organisasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem dan proses penting untuk mendorong adanya kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Menurut Hartina (2017: 38) kolaborasi dimaknai sebagai kerjasama, kebersamaan, saling berbagi tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab antara pihak-pihak yang melakukan kolaborasi untuk mencapai tujuan yang sama. Skala tertinggi dari *collaborative governance* menurut Zaenuri (2018: 48-61) adalah kemitraan. Tahapan *collaborative governance* dimulai dari membangun visi bersama, mendorong partisipasi pada semua stakeholder, membentuk jejaring yang luas antar pelaku pariwisata hingga menghasilkan kemitraan yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu yang panjang. Penjelasan lebih lanjut mengenai keempat tahapan di atas akan dijabarkan di bawah ini.

#### 1. Membangun Visi Bersama (*Shared Vision*)

Membangun visi bersama merupakan dasar pembentukan kerjasama. Tanpa adanya *shared vision* maka proses kolaboratif tidak dapat berjalan. Visi bersama dirumuskan untuk memperjelas arah dan strategi pembangunan, mengatasi tantangan kedepan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, menumbuhkan komitmen diantara stakeholder, serta menjamin kesinambungan system yang dapat disebabkan oleh perubahan kepemimpinan pada stakeholder.

Perumusan visi bersama merupakan langkah awal dalam *collaborative governance*. Perumusan ini dapat dilakukan dengan pengidentifikasian visi masing-masing stakeholder yang kemudian dirumuskan menjadi visi bersama. Kouzes dan Posner dalam Zaenuri (2018: 62-63) menyebutkan ciri-ciri untuk

membangun visi bersama diantara tiga pilar *governance* antara lain adalah memfokuskan pada masa depan yang lebih baik, tertarik pada nilai-nilai umum, mendorong pada harapan serta impian, menyatakan hasil-hasil yang positif, menekankan pada suatu kelompok yang bersatu, menggunakan imajinasi, gambar, dan metafora kata serta mengomunikasikan bentuk antusiasme dan kegembiraan.

Dalam perumusan visi kepariwisataan diharapkan tidak bertentangan atau tetap mengacu pada visi dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra RKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Perumusan visi ini didahului dengan proses penggalian visi dari berbagai stakeholder baik masyarakat, swasta, dan pemerintah. Setelah visi ditetapkan perlu adanya sosialisasi kepada seluruh stakeholder yang terlibat. Untuk melihat tingkat pemahaman stakeholder terhadap visi yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan survey terhadap beberapa orang disetiap stakeholder yang dianggap berkompeten untuk memberikan pendapatnya.

Secara umum kolaborasi dalam visi bersama bersifat *top down*. Hal ini dikarenakan dokumen visi misi yang ditetapkan merupakan produk atau hasil pemerintah, meskipun dalam proses pembuatan dan perumusannya melibatkan sebagian besar stakeholder. Hubungan yang sifatnya *top down* juga dapat terlihat dalam pemberian fasilitas maupun pelaksanaan sosialisasi.

## 2. Partisipasi

Partisipasi merupakan keterlibatan dari semua stakeholder dalam pelayanan dan pengembangan pariwisata. Partisipasi ini dapat meliputi partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelayanan dan evaluasi penyelenggaraan berbagai program pelayanan yang dilakukan secara menyeluruh. Partisipasi aktif merupakan syarat mutlak agar proses *governance* berlangsung. Setelah perumusan visi bersama, maka diharapkan setiap stakeholder dapat melakukan partisipasi secara sukarela tanpa diperintah. OECD dalam Zeanuri (2018: 64) menyatakan bahwa pemerintah yang baik memiliki delapan karakteristik utama yaitu partisipasi, orientasi konsensus, akuntabel, transparan, responsif, efektif dan efisien adil dan inklusif, serta mengikuti aturan hukum.

Dalam membangun kepariwisataan daerah pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan partisipasi sendiri. Perlu adanya sinergi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha pariwisata seperti hotel, restoran, jasa boga, *travel agent*, dan pramuwisata. Partisipasi yang dilakukan oleh stakeholder dilakukan mulai dari pengambilan keputusan, pelayanan pariwisata hingga evaluasi program atau kegiatan. Bentuk partisipasi yang dilakukan oleh seluruh stakeholder sesuai dengan tanggung jawab dan porsinya masing-masing.

## 3. Jejaring (*Networking*)

Setelah adanya partisipasi yang aktif dari semua stakeholder maka perlu adanya jejaring agar terjadi hubungan yang baik antar stakeholder.

Bentuk dari jejaring dapat berupa *event* atau program yang sifatnya lokal, nasional maupun internasional. Keuntungan dari adanya jejaring dapat diperoleh melalui koordinasi antara sektor pemerintah, swasta dan masyarakat. Dengan adanya jejaring maka akan meningkatkan pembelajaran, mengefisiensi penggunaan sumber daya, meningkatkan kapasitas untuk perencanaan dan penanganan masalah yang lebih kompleks dan pelayanan yang lebih baik (Provan dalam Zaenuri, 2018: 67).

Kolaborasi yang terjadi diantara ketiga stakeholder dalam jejaring berkaitan dengan inisiasi, pelaksanaan, dan keberlanjutan jejaring. Dalam inisiasi jejaring tidak hanya dilakukan oleh dinas kebudayaan dan pariwisata tetapi juga diperlukan keterlibatan pihak swasta dan masyarakat untuk menyampaikan ide atau gagasan. Peran pemerintah dalam jejaring adalah memberikan masukan atau ide dan sumber daya untuk memperoleh manfaat bersama. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai aktor utama harus berhubungan dengan masyarakat dan swasta untuk penyelenggaraan semua aktivitas dalam jejaring.

#### 4. Kemitraan

Bentuk terakhir dari kolaborasi adalah kemitraan. Dengan adanya kemitraan maka terdapat pembagian sumber daya dan tanggung jawab bersama terhadap segala resiko yang terjadi. Kemitraan tidak bisa lepas dari tingkat partisipasi yang tinggi dan jejaring yang kuat antar stakeholder. Jika terjadi interaksi yang erat antara stakeholder pariwisata maka akan tercetus keinginan untuk menjadi suatu program kemitraan.



Kemitraan terbentuk akibat adanya kebutuhan yang mendesak diantara stakeholder tentang segala resiko yang dihadapi dalam pemberian pelayanan. Ciri utama dari kemitraan adalah adanya pembagian sumber daya yang ditanggung bersama oleh stakeholder. Proses kemitraan biasanya berlangsung dalam waktu yang cukup lama sesuai dengan kesepakatan dari berbagai pihak kemitraan. Tahap terakhir dari kemitraan adalah terjadinya institusionalisasi. Institusionalisasi ini terjadi dari kegiatan kemitraan dalam wadah organisasi ataupun program yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Fendt (2010: 22) menyebutkan tiga alasan penyebab organisasi perlu melakukan kolaborasi. Alasan tersebut yaitu:

1. Suatu organisasi tidak dapat menyelesaikan suatu tugas tertentu tanpa adanya bantuan dari pihak lain.
2. Melalui kolaborasi, organisasi mendapat keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan bekerja secara individual.
3. Melalui kolaborasi, produk yang dihasilkan oleh organisasi lebih murah sehingga biaya produksi dapat ditekan dan menyebabkan produk tersebut dapat bersaing di pasaran.

Manajemen kolaboratif sangat penting karena mampu membuat kinerja birokrasi menjadi lebih baik serta institusi yang menerapkan manajemen kolaboratif akan mendapat keuntungan. Keuntungan tersebut antara lain adanya kekuatan yang lebih besar sehingga mampu mengatasi berbagai permasalahan yang kompleks, dapat mencapai kemajuan yang lebih tinggi, kolaborasi menjadi lebih berdaya, mendorong upaya pemecahan masalah secara bersama, dapat

mengurangi dan mencegah konflik, menumbuhkan rasa keadilan dan saling percaya, serta mampu mengikis ego baik ego daerah maupun sektoral (Keban dalam Zaenuri, 2014: 161-162).

Kolaborasi menurut Ansell (2007: 546-552) menyiratkan bahwa pemangku kepentingan non-negara akan memiliki tanggung jawab nyata untuk hasil kebijakan. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan harus secara langsung terlibat dalam semua tahap pengambilan keputusan. Dalam manajemen kolaboratif, pemangku kepentingan berpartisipasi secara sukarela sehingga stakeholder harus masuk dan terlibat dalam kolaborasi. Hal ini akan berdampak besar dan dapat dijadikan sebagai faktor dalam menjelaskan apakah kolaborasi dapat berhasil.

Dalam kolaborasi, diperlukan prinsip-prinsip tertentu agar dalam praktiknya bisa berjalan efektif. Bayerlein (2003: 52-61) menawarkan penerapan 10 prinsip dasar kolaborasi sebagai berikut:

1. Aktivitas kolaborasi difokuskan pada pencapaian hasil.
2. Penyusunan sistem penunjang organisasional yang menonjolkan aspek “kepemilikan”. Istilah kepemilikan mengarah pada komitmen personal dari organisasi yang terbentuk melalui kolaborasi.
3. Artikulasi dan penegakan aturan yang rinci.
4. Eksploitasi irama konvergensi dan divergensi. Konvergensi adalah proses di mana semua partisipan dalam kolaborasi membentuk kesepakatan. Sedangkan divergensi adalah suatu kondisi di mana partisipan dalam

kolaborasi memperlihatkan adanya perbedaan cara pandang yang dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

5. Mengatasi *tradeoffs* tepat pada waktunya. Istilah *tradeoffs* mengacu pada keputusan-keputusan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan biaya dan manfaat, namun memiliki kriteria yang bertentangan satu sama lain.
6. Menyusun standar yang lebih tinggi untuk diterapkan pada diskusi, dialog, dan pembagian informasi.
7. Adanya dukungan atas akuntabilitas personal.
8. Mampu menjalankan kewenangan, memanfaatkan informasi dan mengambil keputusan.
9. Menempatkan kolaborasi sebagai sebuah proses yang ketat.
10. Merancang dan menampilkan organisasi yang fleksibel.

Selain prinsip dasar di atas yang diperlukan dalam praktik kolaborasi, hal yang tidak kalah penting adalah faktor-faktor yang menentukan keberhasilan maupun kegagalan dalam kolaborasi. Thompson dalam Ahmad (2017: 53) menawarkan enam faktor untuk menentukan keberhasilan kolaborasi yakni diterapkannya faktor-faktor: 1). *Governance*, 2). *Administration*, 3). *Organizational autonomy*, 4). *Mutually*, 5). *Norms*, dan 6). *Leadership*. Selanjutnya DeSeve dalam Lukito (2016: 8) menyebutkan bahwa ada beberapa hal penting yang dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan kolaborasi dalam *governance*, yang meliputi:

1. *Type networked structured*, menjelaskan tentang deskripsi konseptual suatu keterkaitan antara elemen satu dengan elemen lain yang menyatu secara bersama-sama yang mencerminkan unsur-unsur fisik dari jaringan yang ditangani.
2. *Commitment to common purpose* mengacu pada alasan mengapa sebuah network atau jaringan harus ada.
3. *Trust among the participants*, merupakan adanya saling percaya diantara para pelaku/peserta yang terangkai dalam jaringan didasarkan pada hubungan profesional atau sosial; keyakinan bahwa para partisipan mempercayakan pada informasi-informasi atau usaha-usaha dari stakeholder lainnya dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama.
4. *Governance*, termasuk di dalamnya adanya saling percaya diantara para pelaku, ada batas-batas siapa yang boleh terlibat dan siapa yang tidak boleh terlibat, dan terdapat aturan main yang jelas yang disepakati bersama, serta kebebasan menentukan bagaimana kolaborasi dijalankan.
5. *Access to authority*. Akses terhadap kekuasaan, yakni tersedianya standar-standar (ukuran-ukuran) ketentuan prosedur-prosedur yang jelas yang diterima secara luas.
6. *Distributive accountability/responsibility* yakni berbagi *governance* (penataan, pengelolaan, manajemen secara bersama-sama dengan stakeholder lainnya) dan berbagi sejumlah pembuatan keputusan kepada seluruh anggota jaringan; dan dengan demikian berbagi tanggung jawab untuk mencapai hasil yang diinginkan.

7. *Information sharing* yakni kemudahan akses bagi para anggota, perlindungan *privacy*, dan keterbatasan akses bagi yang bukan anggota sepanjang bisa diterima oleh semua pihak.
8. *Access to Resources* yakni ketersediaan sumber keuangan, teknis, manusia dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan *network*.

Sama halnya dengan DeSeve, Goldsmith dan Kettl juga menyebutkan delapan kriteria keberhasilan sebuah kolaborasi dalam organisasi/pemerintahan, yaitu: *Networked Structure, Commitment to a Common Purpose, Trust Among The Participants, Governance, Access to Authority, Distributive Accountability/Responsibility, Information Sharing, dan Access to Resources* (Irawan, 2017: 6-7).

1. *Networked Structure*, dalam pemerintahan kolaboratif unsur jaringan tidak boleh membentuk hirarki yakni adanya kekuasaan dari salah satu pihak. Sehingga dalam pemerintahan kolaboratif, jaringan harus bersifat organis dengan struktur jaringan yang terlibat yakni tidak ada hirarki kekuasaan, dominasi, dan monopoli. Jadi, semua pihak memiliki kesetaraan hak, kewajiban, tanggung jawab, otoritas, dan kesempatan untuk aksesibilitas dalam mencapai tujuan bersama.
2. *Commitment to a Common Purpose* adalah penyebab sebuah *network* atau jaringan harus ada yaitu karena perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan positif yang dilakukan secara bersama-sama. Tujuan-tujuan ini biasanya terdapat pada misi umum suatu organisasi pemerintah. Selain itu, komitmen yang terjalin tidak boleh memihak salah satu stakeholder

atau pemangku kepentingan kebijakan. Karena ini mengartikan bahwa kolaborasi yang terjalin hanya menguntungkan salah satu pihak. Sehingga komitmen yang terjalin dalam pemerintahan kolaboratif harus untuk kepentingan bersama melalui pencarian solusi bersama.

3. *Trust Among The Participants* adalah hubungan profesional atau sosial, dan keyakinan bahwa para partisipasi mempercayakan pada informasi-informasi atau usaha-usaha dari stakeholder atau pemangku kepentingan lainnya dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga dalam hal ini, setiap stakeholder harus saling percaya karena hubungan profesional terjalin oleh adanya sikap saling percaya antar pihak. Dengan demikian, keberhasilan dari pelaksanaan pemerintahan kolaboratif akan terwujud.
4. *Governance* adalah hubungan yang dijalin oleh para aktor pemerintahan agar dapat menciptakan kepercayaan. Selain itu, ada aturan yang disepakati bersama dari setiap pemangku kepentingan, serta ada kebebasan menentukan bagaimana kolaborasi dijalankan. Dalam hal ini, tata kelola pemerintahan dapat dikatakan *governance* apabila ada kejelasan siapa yang menjadi anggota dan siapa yang bukan termasuk anggota.
5. *Access to Authority* adalah ketersediaan ukuran-ukuran atau ketentuan prosedur-prosedur yang jelas dan diterima secara luas. Jadi, sudah ada aturan kewenangan yang jelas dan diterima oleh masing-masing stakeholder untuk menjalankan peran sesuai kewenangannya.

6. *Distributive Accountability/Responsibility* adalah penataan, pengelolaan, manajemen secara bersama-sama dengan stakeholders dan berbagi sejumlah pembuatan keputusan kepada seluruh anggota jaringan serta berbagi tanggung jawab untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi, dalam pemerintahan kolaboratif harus ada pembagian tanggung jawab yang jelas, dan masing-masing stakeholder (termasuk masyarakat) harus terlibat dalam pembuatan keputusan kebijakan.
7. *Information Sharing* adalah kemudahan para anggota dalam mengakses informasi, dalam perlindungan *privacy*, serta adanya keterbatasan dalam mengakses bagi yang bukan merupakan anggota selama hal tersebut dapat diterima oleh berbagai pihak. Sehingga ada pembagian informasi yang jelas serta kemudahan dalam mengakses informasi disetiap stakeholder dalam penyelenggaraan pemerintahan kolaboratif.
8. *Access to Resources* adalah ketersediaan dan kejelasan dari sumber daya yang ada pada setiap stakeholder guna mencapai tujuan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih agar mencapai tujuan yang sama yang mana melalui proses kerjasama demi tercapainya tujuan yang diinginkan tersebut. Dalam penelitian ini, untuk melihat kolaborasi antara pemerintah Desa Wonokerto dan Masyarakat Desa Wisata Pulesari peneliti menggunakan enam indikator keberhasilan, yaitu visi bersama, partisipasi, komitmen untuk mencapai tujuan bersama (*Commitment to a Common Purpose*), kepercayaan diantara stakeholder (*Trust Among The Participants*) yang

dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Wonokerto dan masyarakat Desa Wisata Pulesari, *Distributive Accountability/Responsibility* dan berbagi informasi (*Information Sharing*).

### **1.6.2 Pengelolaan Desa Wisata**

Desa Wisata (*rural tourism*) merupakan pariwisata yang terdiri dari keseluruhan pengalaman pedesaan, atraksi alam, tradisi, unsur-unsur yang unik yang secara keseluruhan dapat menarik minat wisatawan (Joshi dalam Putri, 2013: 560). Selanjutnya Muljadi (2009: 27), menjelaskan desa wisata sebagai suatu produk wisata yang melibatkan anggota masyarakat desa dengan segala perangkat yang dimilikinya. Desa wisata tidak hanya berpengaruh pada ekonominya, tetapi juga sekaligus dapat melestarikan lingkungan alam dan sosial budaya masyarakat terutama berkaitan dengan nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan, dan lain-lain. Dengan demikian, kelestarian alam dan sosial budaya masyarakat akan menjadi daya tarik bagi wisatawan yang melakukan perjalanan wisata.

Pengertian desa wisata menurut Dinas Pariwisata DIY (2014: 2.1-2.2) adalah sebagai berikut:

1. Suatu penyatuan dalam bentuk struktur masyarakat yang didukung oleh fasilitas dan tidak bertentangan dengan norma dan tradisi yang berlaku di wilayah masyarakat tersebut.
2. Suatu desa yang keunikan serta daya tariknya yang khas dikelola melalui pemberdayaan masyarakat setempat dan didukung dengan pengembangan fasilitas dengan tujuan untuk menarik minat wisatawan serta



menumbuhkan perekonomian masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

3. Definisi Desa Wisata lainnya adalah: *Village Tourism, where small groups of tourist stay in or near traditional, often remote villages and learn about village life and the local environment.* Terjemahan bebas: Wisata pedesaan dimana sekelompok kecil wisatawan tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional, sering di desa-desa yang terpencil dan belajar tentang kehidupan pedesaan dan lingkungan setempat.

**Desa wisata dapat dikembangkan jika** didukung dengan pengelolaan kelembagaan yang sederhana, fleksibel, solid, dan dinamis. Pembentukan lembaga pengelolaan desa wisata dilakukan dengan tujuan asas manfaat. Lembaga yang mengelola desa wisata hendaknya bersifat mandiri, artinya dalam kelembagaan tersebut terdapat masyarakat maupun tokoh desa yang terlibat. Adanya keterlibatan dari masyarakat setempat menjadi unsur utama yang penting dalam pengelolaan desa wisata tersebut. Masyarakat setempat dapat mengambil andil dalam berbagai proses mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan yang ada pada desa wisata tersebut sehingga akan tumbuh sebuah rasa memiliki dalam diri masyarakat untuk terus mengembangkan pariwisata yang ada di desanya (<https://wisatahalimun.co.id/pengembangan-desawisata>).

Bentuk pengelolaan desa wisata pada dasarnya adalah milik masyarakat yang dikelola secara baik, dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting dalam pengelolaan seperti; (1) aspek sumber daya manusia, (2) aspek keuangan, (3) aspek material, (4) aspek pengelolaan dan (4) aspek pasar. Dalam satu wadah

organisasi masyarakat yang berbentuk kemitraan, manajemen korporasi, yayasan atau badan pengelola desa wisata yang unsur-unsur pengelolaannya direkrut dari kemampuan masyarakat setempat dan lebih mendahulukan peranan para pemuda yang memiliki latar belakang pendidikan atau keterampilan yang dibutuhkan (Sastrayuda, 2010: 15).

Sebuah desa dapat dikembangkan menjadi desa wisata apabila desa tersebut memiliki beberapa kriteria (Dinas Pariwisata DIY, 2014: 2.2-2.5) sebagai berikut:

1. Memiliki potensi yang unik serta khas yang memiliki daya tarik yang menjadi modal dasar untuk mengembangkan kawasan tersebut menjadi sebuah desa wisata dengan tujuan menarik minat wisatawan. Adapun potensi yang dapat dikembangkan dapat berupa:
  - a. Lingkungan alam (bentang alam, perbukitan, persawahan, bentuk penataan perkampungan maupun arsitektur bangunan yang memiliki keunikan dan kekhasan, dan sebagainya).
  - b. Kehidupan sosial budaya masyarakat (adat istiadat, pola hidup masyarakat yang memiliki keunikan dan kekhasan, tradisi budaya, kerajinan dan kesenian tradisional, dan sebagainya).
2. Adanya komitmen dari masyarakat untuk terbuka dan mau menerima semua bentuk kegiatan pariwisata yang ada di desanya sehingga terbentuk interaksi antara masyarakat setempat dengan wisatawan untuk saling menghargai satu sama lain dan saling memberikan manfaat. Manfaat yang didapat oleh masyarakat setempat adalah dalam bentuk penghargaan dan

pelestarian budaya setempat serta manfaat ekonomi yang mampu mensejahterakan masyarakat lokal. Sedangkan bagi wisatawan adalah pengkayaan wawasan melalui pengenalan budaya lokal. Untuk itu perlu adanya semangat dan motivasi yang kuat dari masyarakat dalam menjaga karakter yang khas dari lingkungan fisik alam pedesaan dan kehidupan budaya yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat setempat. Hal tersebut juga merupakan faktor yang sangat mendasar, karena komitmen atau motivasi tersebut sesungguhnya yang akan menjamin kelangsungan daya tarik dan kelestarian sumber daya wisata yang dimiliki desa tersebut. Karena apabila hal tersebut tidak terjaga maka modal dasar yang menjadi daya tarik dan magnet wisatawan untuk berkunjung ke desa tersebut akan hilang, dan kegiatan pariwisata tidak dapat berlangsung kembali. Oleh karena itu kelembagaan yang mendukung pengembangan dan pengelolaan desa wisata menjadi faktor pendukung keberhasilan pengembangan desa wisata.

3. Adanya sumber daya manusia setempat yang cukup dan memadai untuk mendukung pengelolaan desa wisata. Hal tersebut sangat penting dan mendasar karena pengembangan desa wisata dimaksudkan untuk memberdayakan potensi SDM setempat sehingga mampu meningkatkan kapasitas dan produktifitasnya secara ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui bidang-bidang yang dimilikinya. Dengan demikian dampak positif pengembangan pariwisata di desa tersebut akan dapat dirasakan langsung masyarakat setempat.

Sebuah desa wisata dikatakan siap apabila mampu membangun jejaring dengan berbagai stakeholder yang berkaitan dengan industri pariwisata serta mempromosikan desa wisata tersebut sehingga dapat dikenal secara luas.

4. Adanya tempat untuk mengembangkan fasilitas yang mendukung desa wisata, seperti: tempat pelayanan umum, *homestay*, sanggar kesenian, dll.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan desa wisata adalah bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa, masyarakat serta swasta meningkatkan ekonomi dengan adanya pariwisata pada daerah desa wisata. Dalam hal ini, pengelolaan Desa Wisata Pulesari dilakukan oleh beberapa stakeholders antara lain pemerintah Desa Wonokerto dan masyarakat desa Pulesari.

## **1.7 Definisi Konseptual**

### **1.7.1 Kolaborasi**

Kolaborasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih agar mencapai tujuan yang sama yang mana melalui proses kerjasama demi tercapainya tujuan yang diinginkan tersebut.

### **1.7.2 Pengelolaan Desa Wisata**

Pengelolaan desa wisata adalah bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa, masyarakat serta swasta meningkatkan ekonomi dengan adanya pariwisata pada daerah desa wisata.

## 1.8 Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan lima indikator keberhasilan kolaborasi, yaitu sebagai berikut:

Indikator	Parameter
<i>Shared Vision</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bersifat <i>top down</i></li><li>• Tidak bertentangan dengan RPJP, RPJM, Renstra RKP</li><li>• Fokus pada masa depan dan menyatakan hasil-hasil yang positif</li></ul>
Partisipasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Semua stakeholder ikut serta dalam pengambilan keputusan, pelayanan dan evaluasi</li></ul>
<i>Commitmen to common purpose</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alasan sebuah network harus ada</li><li>• Tidak boleh memihak salah satu stakeholder</li></ul>
<i>Trust Among the Participants</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Setiap stakeholder saling percaya dan tidak curiga satu sama lain</li></ul>
<i>Distributive accountability/responsibility</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Berbagi dalam penataan, pengelolaan, manajemen</li><li>• Berbagi dalam pembuatan keputusan</li><li>• Berbagi tanggung jawab</li></ul>
Berbagi informasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kemudahan akses</li><li>• Perlindungan <i>privacy</i></li><li>• Keterbatasan akses bagi yang bukan anggota</li></ul>

## 1.9 Metode Penelitian

### 1.9.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007: 4-5) memberi definisi bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Menurut Sugiyono (2014: 8-9) penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan pada kondisi alamiah dan etnographi karena banyak digunakan pada penelitian bidang antropologi budaya. Penelitian kualitatif ini berlandaskan filsafat postpositivisme untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci dalam penelitian. Oleh karena itu, sebagai instrumen kunci dalam penelitian, peneliti berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data serta membuat kesimpulan atas semuanya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Menurut Winarni (2011: 12) metode deskriptif adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena dalam penelitian ini peneliti melihat bagaimana kolaborasi masyarakat dan pemerintah desa dalam pengelolaan Desa Wisata Pulesari.

### **1.9.2 Unit analisa**

Penelitian ini menggunakan teknik purposive untuk menentukan subjeknya. Teknik purposive digunakan saat sampel yang dituju untuk diteliti telah ditentukan berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013: 85). Pertimbangan tertentu yang dimaksud ialah pertimbangan-pertimbangan bahwa narasumber tersebut merupakan subjek yang paling tahu dan dapat memberikan informasi tentang kolaborasi yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam pengelolaan desa wisata. Adapun subjek yang dinilai paling tahu mengenai pengelolaan Desa Wisata Pulesari adalah masyarakat Pulesari dan pemerintah Desa Wonokerto.

### **1.9.3 Jenis sumber data**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data sedangkan sumber data sekunder adalah sumber yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data baik melalui orang lain ataupun dokumen (Sugiyono 2014: 137). Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat dan pemerintah desa. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen berita ataupun artikel serta jurnal penelitian yang sudah ada sebelumnya dan tinjauan literature terkait dengan kolaborasi dalam pengelolaan desa wisata.

### **1.9.4 Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitiannya. Pengumpulan data dapat dilakukan

dengan menggunakan cara wawancara (*interview*), pengamatan (observasi), angket (kuesioner), dokumentasi dan gabungan keempat teknik tersebut (Sugiyono, 2014: 225). Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### 1. Observasi

Penelitian ini menggunakan salah satu teknik pengumpulan data berupa observasi. Observasi menurut Winarni (2011: 148) adalah metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan serta pencatatan baik secara sistematis, objektif, logis, dan rasional terhadap kejadian untuk mencapai suatu tujuan (Arifin, 2011: 213).

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara kepada orang yang diwawancarai dengan maksud tertentu. Menurut Winarni (2011: 132), *interview* atau wawancara merupakan pengumpulan data yang menghendaki komunikasi antara penyelidik dengan subyek atau responden. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan subyek penelitiannya.

Arikunto (2011: 198) menyatakan bahwa pedoman wawancara terbagi dua yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak



terstruktur menurut Dimiyati (2013: 89) adalah wawancara dengan memuat garis besar isi materi yang akan ditanyakan. Pada penelitian ini, wawancara akan dilakukan peneliti kepada obyek penelitian yaitu masyarakat dan pemerintah desa selaku pengelola desa wisata.

**Tabel 1.2** *Narasumber Penelitian*

No	Narasumber	Jumlah
1.	Pemerintah Desa Wonokerto	2
2.	Pengelola Desa Wisata Pulesari	3
3.	Masyarakat non pengelola	3
4.	Tokoh masyarakat	2

### 3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013: 329) menyebutkan bahwa dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang menggunakan dokumen berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa gambar, tulisan, maupun karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan antara lain biografi, peraturan, kebijakan, catatan harian, dan sejarah kehidupan. Dokumen yang berbentuk gambar dapat berupa foto, gambar hidup, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya dapat berupa karya seni. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam suatu penelitian.

#### 1.9.5 Teknik analisa data

Analisis data pada penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2014: 244) merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis mengenai data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori lalu menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa,

menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dan didapat dari berbagai sumber, mulai dari hasil wawancara, hasil kuesioner dan studi literatur yang telah dicatat serta dari hasil dokumentasi. Setelah data-data tersebut dibaca, ditelaah, dan dipelajari maka akan dilakukan reduksi data. Mereduksi data berarti membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok, menfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan pola serta membuang apa yang sekiranya tidak dibutuhkan (Sugiyono, 2014: 247). Setelah data direduksi, langkah analisis data selanjutnya yaitu melakukan penyajian data dalam bentuk teks atau uraian deskriptif, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya sehingga data tersebut dapat menjadi sebuah laporan yang lengkap dan memiliki hubungan yang menyeluruh. Setelah peneliti melakukan *display* (penyajian data), langkah berikutnya yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hasil temuan dan verifikasi data. Penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah mendapat laporan secara menyeluruh pada tahap penyajian data. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara melihat dan mempertimbangkan data yang ada secara induktif untuk mendapat kesimpulan awal yang masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.